



Menelisik Ulang Strategi Kebudayaan NU

JJ Kusni

Pekerja biasa pada Koperasi Restoran Indonesia di Paris

Email: meldiwa@yahoo.com.sg

Apa masalah pokok dari soal *Reiventing Strategi Kebudayaan NU* yang saya jabarkan dalam kata-kata: Menelisik Ulang Strategi Kebudayaan NU? Dalam melihat masalah ini, saya berangkat dari arti penting kebudayaan dalam kehidupan berbangsa, bernegeri, dan bernegara serta arti penting adanya gerakan kebudayaan membasis atau yang mengakar di negeri yang majemuk seperti negeri kita: Indonesia. Kebudayaan, seperti halnya dengan soal salaman dengan perempuan tetangga terdekat, bagi saya merupakan dasar konkret dan berpengaruh langsung pada kehidupan sehari-hari. Tidakkah NU sesungguhnya bukan sebuah partai politik tapi suatu gerakan kebudayaan? Karena itu, saya kira, isu ini sangat relevan dan niscaya jadi renungan siapa pun baik di kalangan NU atau pun di luar NU. Tidak terlalu berlebihan kalau mengatakan bahwa NU mempunyai peran dan pengaruh besar dalam hidup berbangsa, bernegeri dan bernegara.

Sebagai suatu gerakan kebudayaan, dalam situasi dan kondisi Indonesia sekarang, saya kira NU menghadapi suatu tantangan tidak kecil, bahkan sangat menantang. Pertanyaannya, mampukah NU sebagai salah satu organisasi terbesar

Islam di Indonesia menjawab tantangan Indonesia hari ini secara tanggap dan apresiatif? Menawarkan suatu perekat bagi bangsa dan negeri yang sangat majemuk ini? Bagaimana keadaan kebudayaan Indonesia hari ini? Untuk melihat keadaan kebudayaan hari ini, barangkali ada perlunya kita menyimak ulang keadaan kebudayaan kita di masa silam, terutama pada masa tahun-tahun 1960-an. Walau pun secara sepintas.

Di masa tahun 60-an, guna menanggapi Lekra yang dipandang sebagai gerakan kebudayaan yang sering dikatakan dekat dengan PKI, partai-partai politik berlomba-lomba mendirikan lembaga kebudayaan masing-masing. Pihak militer pun tidak berpangku-tangan melakukan kegiatan di bidang kebudayaan. Ya gerakan kebudayaan rakyat dari bawah yang kemudian dengan tegas menolak berafiliasi dengan PKI. Afiliasi artinya lembaga kebudayaan berada di bawah komando partai politik. Dijadikan alat partai politik. Sastrawan-seniman menjadi partisan partai politik. Kehilangan status mereka sebagai warga republik sastra-seni yang berdaulat.

Semasa Orde Baru (Orba), ketika Lekra dilarang, lembaga-lembaga kebudayaan lainnya, seperti Lesbumi, LKN, Lesbi,

Lekrindo, dan lain-lain ikut lumpuh. Keadaan sangat berubah sejak Orba mengendalikan kekuasaan di negeri ini. Tapi kemudian, lambat-laun, sastrawan-seniman mendapatkan jalan pemecahan sendiri, atas dasar keadaan sosial-ekonomi, politik dan kebudayaan, dengan membangun komunitas-komunitas independen tanpa berafiliasi dengan partai politik apapun dan mana pun, dengan orientasi masing-masing. Adanya komunitas-komunitas sastra-seni independen di berbagai pulau dan daerah ini, saya anggap sebagai karya khas angkatan sastrawan-seniman zaman sekarang yang sesuai zaman. Keadaan yang perlu diperhatikan dan dihitung oleh siapa pun. Lahir dan bermunculannya komunitas-komunitas sastra-seni ini, saya pahami sebagai wujud dari usaha para sastrawan-seniman kembali ke posisi mereka sebagai warga sastra-seni yang berdaulat. Komunitas-komunitas ini muncul di berbagai kalangan, baik di kota besar dan kecil bahkan di pedesaan seperti halnya kelompok Lima Gunung di Jawa Tengah dengan tokoh-tokoh seperti Mas Tanto dan kawan-kawannya. Bahkan sampai Papua. Hanya saja saban berjumpa dengan komunitas-komunitas ini, saya sering terhenti pada pertanyaan mengenai orientasi atau arah berkesenian mereka. Mau ke mana mereka? Mau apa? Apakah sekadar berkarya dan berkarya. Apakah mereka berkesenian secara sadar? Yang agak jelas pada saya adalah orientasi kelompok Lima Gunung. Tapi saya pun tidak terlalu mempersoalkan masalah-masalah ini karena waktu akan membantu

mereka berproses dan menemukan jalan karena sastrawan-seniman pada galibnya adalah manusia-manusia penanya. Manusia pencari dan terus mencari. "Yang mencari akan mendapat, yang mengetok akan dibuka". Saya juga tidak terlalu hirau akan keadaan begini dengan alasan mengapa tidak saling membiarkan hidup berdampingan dan bersaing sehat sesuai pandangan "Biar bunga mekar bersama, seriub aliran bersaing suara" sebagai wujud bahwa "kebudayaan itu majemuk sedangkan kemanusiaan itu tunggal". Apakah kebudayaan menjadi kebudayaan jika ia mengingkari kemajemukan dan kemanusiaan tunggal ini?

Barangkali keadaan kongkret ini pun perlu jadi angka hitungan bagi NU, saat ia berkeinginan menelitik kembali strategi kebudayaannya agar tanggap zaman dan apresiatif, terutama dalam keinginan sejumlah teman mengaktifkan kembali Lesbumi. Saya sama sekali tidak ada keberatan apa pun dengan keinginan untuk mengaktifkan kembali Lesbumi.

Pertanyaan penting dan pokok bagi saya: Apakah pengaktifan kembali Lesbumi bisa tanggap zaman dan apresiatif? Apresiatif artinya sesuai dengan tuntutan masyarakat yang majemuk. Adakah artinya Lesbumi diaktifkan kembali jika tidak tanggap zaman dan apresiatif? Tidakkah pengaktifan kembali ini akan menjadi suatu hal eksklusif tanpa mempunyai perspektif? Saya khawatir pengaktifan kembali Lesbumi tanpa perspektif dan tanpa menelitik kembali strategi kebudayaan NU akan menjadi sesuatu yang tidak berarti dan bersifat eksklusif



www.gkar-law.com

saja. Eklusivisme tidak pernah mempunyai perspektif yang menarik dan yang bisa diharapkan secara nasional, kecuali secara kepentingan sempit. Kepentingan sempit inilah yang diharapkan oleh NU dengan "reiventing strategi kebudayaannya?"

Dengan menelisik ulang strategi kebudayaannya, apakah kesempatan perspektif atautkah kepentingan nasional yang diidamkan NU sebagai suatu organisasi kebudayaan? Ini adalah dua orientasi atau arahan yang berjangka panjang dengan dua perspektif dan dampak berlainan yang kiranya perlu dihitung benar oleh pemuka-pemuka NU yang secara nasional punya peran dan pengaruh. Apakah NU egosentris atau berpikir secara nasional? Barangkali kepentingan egosentris dan nasional ini perlu dipertimbangkan oleh pemuka-pemuka NU dalam

menelisik ulang strategi kebudayaan NU, jika NU ingin menjadikan Indonesia sebagai tempat kehidupan manusiawi bagi anak manusia yang selalu majemuk, muslim atau pun tidak muslim. Apa artinya NU jika hanya memikirkan Muslim Indonesia dan menyingkirkan yang tidak Muslim dari pemikiran serta tindakan? Egosentrisakah orang Muslim itu? Entah kalau demikian, dan saya kira, jika terjadi demikian, maka NU bukan NU sesungguhnya lagi.

Bukan NU yang memanusiawikan manusia dan berkeinginan menjadikan negeri ini sebagai tempat hidup manusiawi putera-puteri Indonesia seperti yang dikandung oleh wacana "rengan tingang nyanak jata" [anak enggang, putera-puteri naga] manusia Dayak. Menelisik kembali strategi kebudayaan NU, saya kira, tidak bisa mengelak dari orientasi manusiawi begini. Mengaktifkan kembali Lesbumi, saya kira tidak luput dari arahan ini. Tidak lagi seperti masa tahun 1960an. Tidak menghidupkan eksklusivisme.

Apakah NU punya potensi menumbuhkan gerakan kebudayaan merakyat dalam skala nasional? Sejak lama saya melihat bahwa NU sangat mempunyai potensi ini. Dari mana saya melihat potensi ini? Saya melihatnya terutama dari adanya pesantren-

pesantren yang berada di tengah-tengah masyarakat bawah. Adanya pesantren-pesantren di pedesaan, saya lihat sebagai dekatnya NU dengan masyarakat luas, sekali lagi masyarakat lapisan bawah, dengan sistem mandiri, bersandar pada kemampuan masyarakat lokal sendiri. Saya membayangkan bahwa pesantren-pesantren bisa dijadikan dasar pengembangan pembangunan gerakan kebudayaan rakyat di skala negeri kita mulai dari bawah. Masalahnya, bisakah pesantren-pesantren bersifat terbuka sehingga bisa menampung kepentingan dan apresiasi masyarakat dalam bidang kebudayaan, termasuk pendidikan? Dengan keterbukaan begini, maka saya membayangkan pesantren-pesantren yang pada dasarnya merakyat, pesantren bisa dijadikan basis membangun gerakan kebudayaan merakyat di negeri kita. Bahkan bisa dijadikan basis pemberdayaan sebagai dasar pembangunan. Barangkali di sinilah perlu adanya pesantren modern dalam arti tanggap zaman dan apresiatif. Terbuka terhadap perkembangan dan kenyataan.

Dalam konteks gerakan kebudayaan rakyat skala nasional ini, saya ketika berbicara di Muntilan tahun lalu mengajukan pertanyaan, apakah lembaga kebudayaan NU masih perlu mencantumkan kata “muslim” atau “Islam”. Apakah pencantuman dua kata atau salah satu kata tersebut tidak memagari perkembangan dan ruang lingkup gerak serta perspektif gerakan kebudayaan rakyat untuk skala nasional? Pertanyaan ini kembali saya ajukan ketika berdiskusi dengan teman-teman di kantor Syarikat

Indonesia Yogyakarta tahun lalu dan kepada Mas Goen [Goenawan Mohamad] ketika kami berjumpa tahun 2008 ini di Paris. Menjelaskan pendapat saya kepada Mas Goen, bahwa jika Lesbumi bisa membuang “Muslim”nya, barangkali lembaga kebudayaan yang masih tersisa dari zaman periode Soekarno, punya pengalaman dan berpotensi besar ini bisa menampung keragaman di kalangan bangsa kita. Saya tidak melihat salahnya jika di dalam lembaga tersebut misalnya terdapat kemudian karya-karya yang bernafas keislaman, ke kristenan, Budhis, dan lain-lain.

Mengomentari pendapat saya, Mas Goen mengatakan secara singkat sebagai acuan: “Apa salahnya jika ternyata Muslim itu Muslim baik”. Sebagai sahabat, pada kesempatan ini, melalui Jurnal Tashwirul Afkar ini, pertanyaan tersebut ingin saya ketengahkan kembali kepada kawan-kawan NU. Sekarang, bagaimana hubungan antara gerakan kebudayaan yang digerakkan oleh NU dan komunitas-komunitas lainnya?

Seperti saya katakan di atas, saya kira lembaga kebudayaan NU [yang entah bagaimana bentuknya setelah “re-inventing strategi kebudayaan NU] dan NU sendiri, niscayanya memperhitungkan adanya komunitas-komunitas sastra-seni yang muncul di berbagai pulau dan daerah tanah air. Dengan adanya gerakan kebudayaan yang digerakkan oleh NU dan lembaga kebudayaannya, saya kira ini bisa berfungsi sebagai kekuatan teras penggerak dan pendorong guna meng-himpun komunitas-komunitas sastra-seni

yang bertebaran di seluruh pulau dan daerah. Dan hal ini tidak terbayangkan akan bisa terjadi jika sejak dini membangun pagar diri. Lalu dengan lembaga kebudayaan demikian, mengapa tidak pada suatu hari, lembaga kebudayaan demikian bekerja sama dengan komunitas-komunitas yang ada di seluruh negeri, mereka bisa menjadi pemrakarsa terselenggaranya suatu kongres kebudayaan dari bawah dan berkelanjutan secara efektif? Kongres kebudayaan dari bawah dan bukan dari atas, sampai sekarang belum pernah terjadi. Yang sudah terjadi selalu kongres kebudayaan dari atas, diselenggarakan oleh pemerintah dan tidak nyata dampaknya untuk pengembangan gerakan kebudayaan di negeri ini. Hal ini hanya mungkin terjadi dan dilakukan oleh NU, apabila ada terjadi penelidikan ulang terhadap strategi kebudayaan NU. Sehingga adanya penelidikan strategi kebudayaan tanggap zaman dan apresiatif dari NU barangkali merupakan suatu keniscayaan jika NU mau lebih berperan dalam pemberdayaan, pembangunan dan penyelamatan bangsa, terutama dari segi kebudayaan.

Ketika berbicara tentang kongres kebudayaan nasional dari bawah, saya tidak membayangkan bahwa kongres itu akan melahirkan sebuah organisasi tunggal kebudayaan. Saya hanya memimpikan kerjasama antara lembaga-lembaga dan komunitas-komunitas untuk menggalakkan adanya gerakan kebudayaan berskala nasional di negeri kita berpartokan pada "biar bunga mekar bersama, seribu aliran bersaing suara" berorienta-

sikan nilai-nilai republikan dan berkeindonesiaan.

Yang saya maksudkan dengan nilai-nilai republikan tidak lain dari kemerdekaan, kesetaraan dan persaudaraan. Sedangkan berkeindonesiaan adalah menghormati dan mengakui keragaman etnik, bentuk dan nilai-nilai budaya mereka dalam semangat satu bangsa. Beragam tapi tunggal sebagai bangsa. Beragam dalam bentuk budayanya tapi tunggal dalam kemanusiaan. Karena lahir seorang orang Jawa, Batak, Bugis, Dayak, Papua, Ambon, Manado, Minang dan lain-lain sama sekali tidak bertentangan dengan menjadi Indonesia dan anak manusia. Barangkali jika kemudian di negeri ini lahir dan berkembang suatu gerakan kebudayaan yang republikan dan berkeindonesiaan demikian, bisa diharapkan adanya sumbangan nyata kebudayaan bagi kehidupan berbangsa, bernegeri dan berbangsa yang kita kenal sebagai Republik Indonesia dan kebudayaannya. Barangkali inilah mimpi yang ingin saya bagikan kepada kawan-kawan NU dengan keyakinan bahwa kita mampu mewujudkannya sebagaimana bangsa ini sanggup memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Republik dan Indonesia adalah tujuan sekaligus orientasi kebudayaan dan bisa diwujudkan nyata oleh manusia-manusia republikan dan berkeindonesiaan pula. Manusia-manusia beginilah yang oleh orang Dayak dahoeloe disebut sebagai "panutung matanandau tutang bulan pabelum" [penyulut cahaya pada matahari dan bulan kehidupan]. ❁